

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, R., 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iswandi. U dan Indang Dewata, 2020, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, “Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah Indonesia”, Makassar, Pustaka Refleksi.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad SOOD, 2021, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon et al., 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, H.R., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ten Berge, J.B.J.M., dalam Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wahyu Nugroho, 2022, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Yudhi Setiawan, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal, Tesis, dan Skripsi

A. Rusdina, 2015. "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab." *Vol IX No 2*, hlm. 247, ISSN 1979-8911.

Bachtiar Marbun, 2021, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt. Glh/2018/Pn. Jkt. Utr)." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria 1.1*: 91-100.

Chikmawati, N. F., 2013, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)", *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2): 396-417.

Cornelia Mirwantini Witomo, 2018. "Dampak Budidaya Tambak Udang Terhadap Ekosistem Mangrove." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(2): 75-85.

Endri Gustami, 2023. "Ancaman Deforestasi Ekosistem Mangrove serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". *Stofor Journal*, 7(1).

Hanifah Prihandini, Indah Dwiprigitaningtias, dan Zulfika Ikrardini. 2024. "Tinjauan Yuridis Izin Tambak Udang Pada Taman Nasional Oleh Pemerintah Jepara Menurut PP No. 22/2021." *Jurnal Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1).

Irsal Marsudi Sam, Setiowati, dan Rakhmat Riyadi. 2020. "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore." *Tunas Agraria*, 3(2): 122–139.

- Kisman Lantang, 2011. "Pendapatan Petani Tambak Di Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso." *Jurnal EKOMEN*, 11(1): 27.
- Lisa Medika Yati, Rembrandt, dan Syofiarti. 2023. "Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Usaha Tambak Udang yang Belum Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)." *UNES Law Review*, 6(2): 6407–6420.
- N. Herlina, 2017. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2): 162-176.
- Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, dan Subianta Mandala. 2018. "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam." *Jurnal Media Hukum*, 25(2): 217–227.
- R. Mina, 2016, "Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup". *Arena Hukum*, 9(2): 149-165.
- S. Satria, dan Nugraha, D. A. 2020. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2): 119–137.
- Sumadi Kamarol Yakin. 2017. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal*, 2(1): 113–132.
- Tito Irwanto, Herry Novrianda, dan Dora Wasi. 2018. "Strategi Pemasaran Udang Vannamei Pada Tambak Udang PT. Cendana Prioritas Lestari Kabupaten Bengkulu Tengah." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 6(1).
- Yuli Agus Setyawan, 2019. "Persepsi Dan Partisipasi Petani Tambak Dalam Pelestarian Lingkungan Kawasan Pesisir Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo". *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Wilayah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040.

D. Internet

https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/#Pengertian_Eksploitasi
(Diakses 02 Oktober 2024 pukul 16.20)

<https://bunghatta.ac.id/artikel-356-perlunya-revisi-rtrw-dan-pengelolaan-lingkungan-tambak-udang-vaname-di-sumatera-barat.html>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/651954/penurunan-jumlah-tambak-udang-di-padangpariaman>.

<https://www.rri.co.id/padang/daerah/429091/walhi-soroti-kerusakan-tanaman-mangrove-di-sumbar>

<https://www.walhisumbar.org/ekosistem-mangrove-di-nagari-gasan-gadang-dan-malai-v-suku-terancam-tambak-udang/>

<https://www.liputan7.id/daerah/2121054852/tanggapi-pengaduan-masyarakat-tentang-tambak-udang-di-kecamatan-batang-gasan>

E. Lain-Lain

Wawancara dengan Maishakila Putri Riza, S.T. dan Datin Suhaila, S.T. (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama) pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman [Jumat, 25/04/2025 Pukul 15.00 WIB]

Wawancara dengan Ir. Eva Fatimah, M.M. selaku Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman [Senin, 05/04/2025 Pukul 09.00 WIB]

Data Tambak Saat Tinjauan Lapangan Oleh Tim Pengawasan Yang Terdiri Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, Dinas Perikanan Dan Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman [Tanggal 7-9 Mei 2025]

